

RATUSAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) TERIMA BANSOS KEMATIAN



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.id/wp-content/uploads/2023/11/Anggaran.jpg>

Isi Berita:

PATI, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsosp3akb) menyerahkan santunan kematian bagi 225 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Ruang Pragola Setda Pati. Mereka masing-masing mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 1 juta.

Kepala Dinsosp3akb Kabupaten Pati, Indriyanto mengatakan bahwa santunan tersebut diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Yakni kepada mereka yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia.

“Ini penyerahan santunan kematian yang tahap 3. Masing-masing penerima memperoleh 1 juta rupiah, total penerimanya ada 225 penerima,” jelas Indriyanto sesuai penyaluran bantuan, Kamis (9/11/23).

Pihaknya menuturkan, penerima tersebut juga merupakan masyarakat yang sudah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yakni mereka yang masuk dalam kategori Bantuan Tidak Terduga (BTT) dengan sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati.

Sementara itu, PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro berharap bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi penerima. Ia sekaligus berpesan agar santunan itu digunakan sebaik-baiknya.

“Jangan kemudian dilihat dari nominalnya. Meskipun sedikit tapi semoga ini dapat bermanfaat bagi keluarga khususnya yang ahli waris yang ditinggal keluarga,” tambahnya. (lut/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2023/11/10/ratusan-kpm-terima-bansos-kematian/>, “Ratusan KPM Terima Bansos Kematian”, tanggal 10 November 2023.
2. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2023/11/08/ratusan-ahli-waris-terima-santunan-kematian-tahap-/>, “Ratusan Ahli Waris Terima Santunan Kematian Tahap III”, tanggal 8 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsosp3akb) menyerahkan santunan kematian bagi 225 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Ruang Pragola Setda Pati. Mereka masing-masing mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 1 juta.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi